



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

UMKM Indonesia

Tarif Khusus Pajak Penghasilan bagi UMKM

*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2018*

*Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari
Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak
yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak



TERIMA KASIH
atas kontribusi Anda
bagi negeri melalui
Pembayaran Pajak



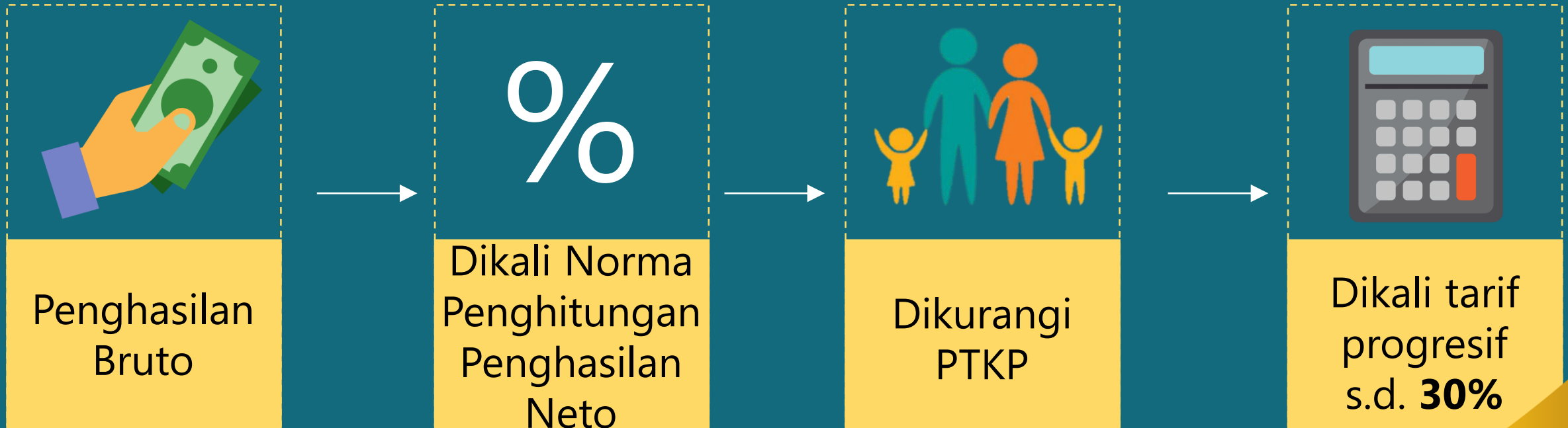
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak



KE MANA? SATU JUTA UANG PAJAK KITA

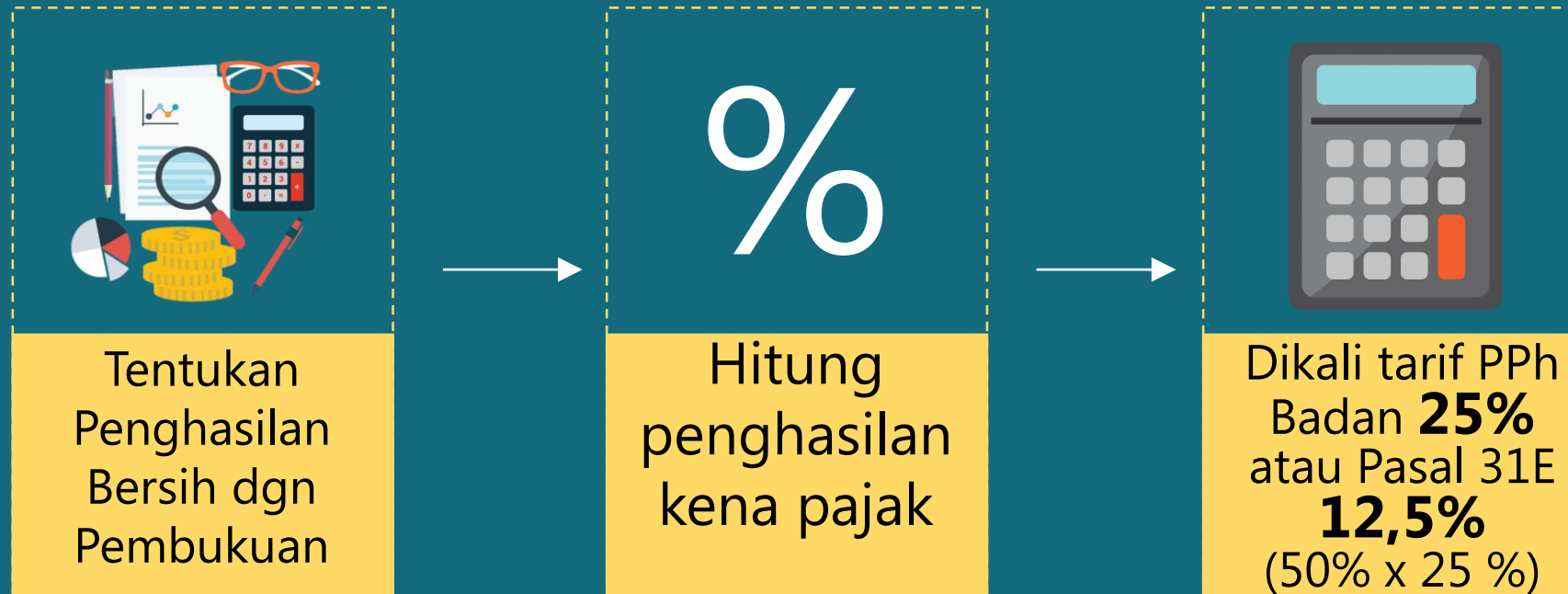
TAHUKAH ANDA?

Cara umum hitung PPh bagi UMKM sebelum Juli 2013
bagi **WP Orang Pribadi**



TAHUKAH ANDA?

Cara umum hitung PPh bagi UMKM sebelum Juli 2013
bagi **WP Badan**



TAHUKAH ANDA?

Cara hitung PPh bagi UMKM sejak berlakunya PP 46 tahun 2013 bagi **WP Orang Pribadi & WP Badan**



Penghasilan
Bruto



Dikali tarif **1%**
bersifat FINAL

Kini
TARIF TURUN!



Mengapa diberikan pada
UMKM?



UMKM tulang punggung perekonomian

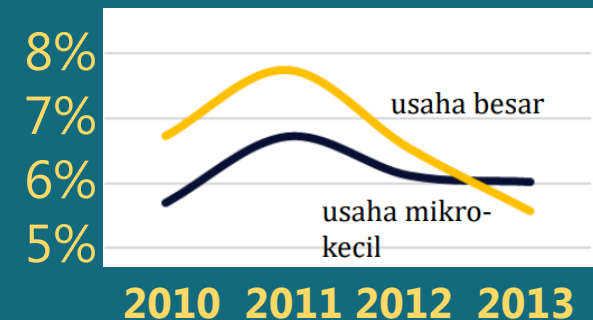


UMKM mendominasi perekonomian

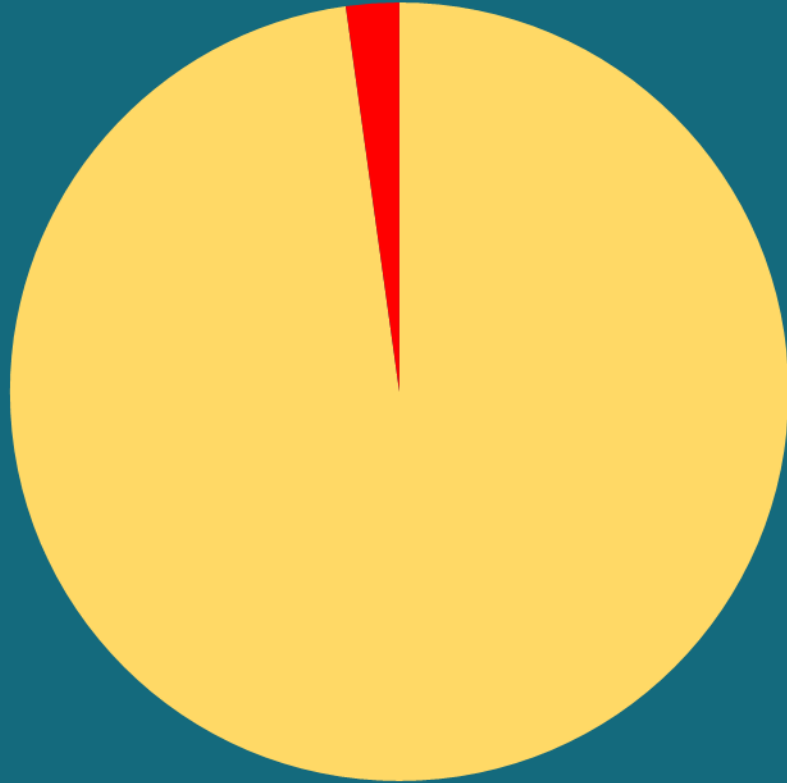
- **jumlah unit** usaha (98,8% dari total unit usaha)
- **tenaga kerja** (96,99% dari total tenaga kerja)
- **Produk Domestik Bruto** (60,3% dari PDB)

Resiliensi, khususnya Usaha Mikro & Kecil

Ketika usaha besar mulai melambat, usaha mikro-kecil **cukup stabil** (pertumbuhan PDB)



Kontribusi Penerimaan dari UMKM

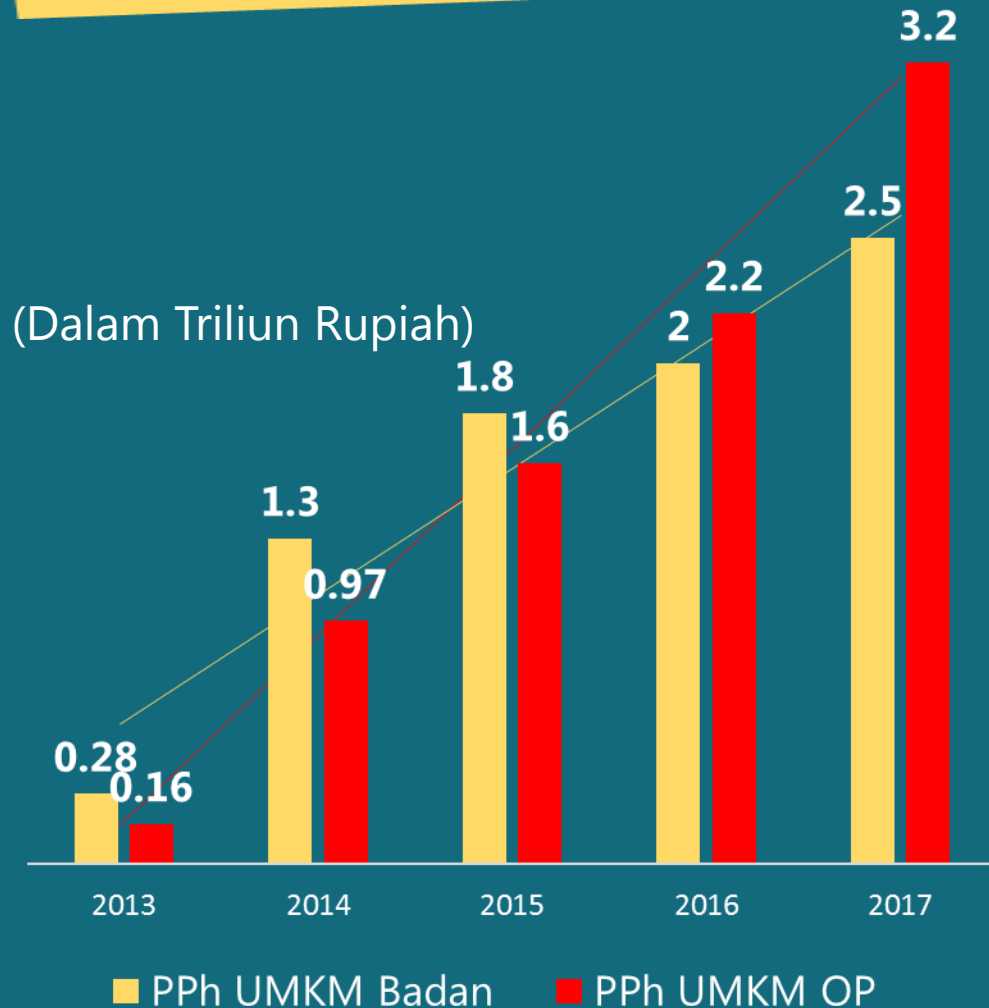


■ PP 46/2013

"Pembayaran PPh UMKM (PPh Final) pada tahun 2017 **berkontribusi sebesar 2.2%** terhadap **total penerimaan PPh yang dibayar sendiri oleh WP** (WP Badan dan WP OP)"

* PPh yang dibayar terdiri dari PPh Pasal 25/29 WP OP dan Badan dan PPh Final PP 46

Komposisi Penerimaan PPh UMKM 2013-2017

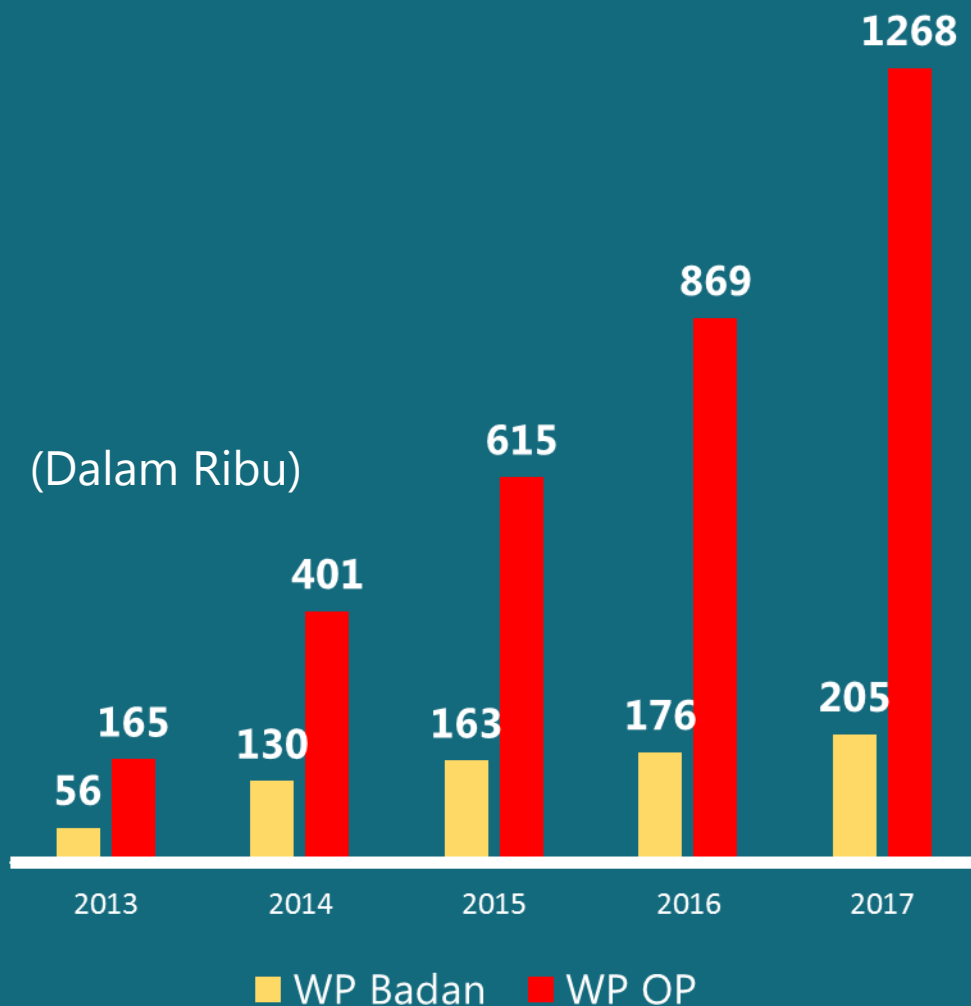


Meskipun kontribusinya relative kecil, penerimaan PPh UMKM (PPh Final) menunjukkan tren peningkatan pada periode 2013-2017.

Pembayaran oleh WP OP menunjukkan tren pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan pembayaran oleh WP Badan

* PPh Final UMKM diberlakukan sejak 1 Juli 2013. Dengan demikian penerimaan Tahun 2013 hanya mencakup penerimaan selama 6 bulan.

Perkembangan Jumlah Pembayar 2013-2017



	WP Badan	WP OP
2013	25.3%	74.7%
	-	-
2014	24.5%	75.5%
	132.1%	143%
2015	19.9%	80.1%
	25.4%	53.4%
2016	16.8%	83.2%
	8%	41.3%
2017	13.9%	86.1%
	16.5%	45.9%

■ Komposisi

■ Pertumbuhan

Sebaran Pembayaran PPh UMKM Tahun 2017



7 provinsi kontributor terbesar menyumbang 80% dari total penerimaan PPh UMKM tahun 2017

UNTUK APA?

Mendorong **peran serta masyarakat** dalam kegiatan ekonomi formal

Lebih memberikan **keadilan**

Kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan

Memberi **kesempatan berkontribusi** bagi negara

Pengetahuan tentang manfaat pajak bagi masyarakat meningkat



SUBJEK PAJAK

PAJAK
UMKM
0.5
%



Orang Pribadi
Jangka waktu 7 tahun



Badan Usaha , berbentuk:

- PT, dengan jangka waktu 3 tahun
- CV, Firma, & Koperasi, dengan jangka waktu 4 tahun

Jangka waktu dihitung, sejak:

WP Lama : Tahun Pajak PP berlaku

WP Baru : Tahun Pajak terdaftar

WP TIDAK DIKENAI PP INI



- 1** WP yang **memilih untuk dikenai PPh Pasal 17**
(Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan ke KPP dan pada Tahun Pajak-Tahun Pajak berikutnya terus menggunakan Tarif PPh Pasal 17)
- 2** WP **Badan** yang memperoleh **fasilitas PPh**
Pasal 31A UU PPh atau **PP 94 Tahun 2010**
- 3** **BUT**
- 4** **CV** atau **Firma** yang:
 - *dibentuk oleh beberapa WP OP yang memiliki keahlian khusus; dan*
 - *menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas*

OBJEK PAJAK



Penghasilan
dari **USAHA***



Peredaran bruto
(omzet) setahun
tidak melebihi
Rp 4,8Miliar



Omzet **ditotal** dari
seluruh
gerai/outlet, baik
pusat atau cabang

****USAHA antara lain** usaha dagang, industri, dan jasa, seperti misalnya toko/kios/los kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung/rumah makan, salon, dan usaha lainnya*

PEREDARAN BRUTO TERTENTU



Merupakan jumlah peredaran bruto dalam **1 (satu) tahun dari tahun pajak terakhir** sebelum tahun pajak bersangkutan, yang ditentukan berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari usaha, **termasuk peredaran bruto dari cabang**



Dalam hal **WP Orang Pribadi suami istri** yang menghendaki perjanjian **pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis (PH)** atau isterinya menghendaki **memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT)**, peredaran bruto tertentu ditentukan berdasarkan **penggabungan** peredaran bruto usaha dari suami dan isteri

BUKAN OBJEK

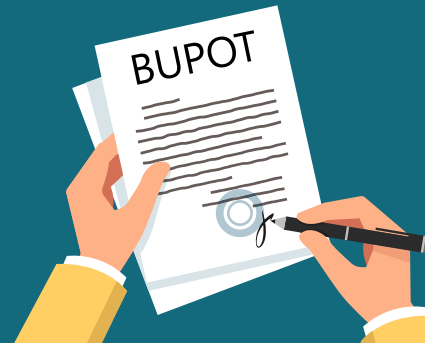


- 1** Penghasilan dari jasa sehubungan dengan **Pekerjaan Bebas**
Misalnya: dokter, advokat/pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara, dll
- 2** Penghasilan di **Luar Negeri**
- 3** Penghasilan yang **dikenai PPh Final**
Misal: sewa rumah, jasa konstruksi, PPh usaha migas, dan lainnya yang diatur berdasarkan PP
- 4** Penghasilan yang **dikecualikan sebagai objek pajak**

PELUNASAN PAJAK



Setor sendiri



Dipotong atau
dipungut oleh
Pemotong atau
Pemungut *

**WP mengajukan Surat Keterangan ke KPP*

A vertical column of five white footprints on the left side of the slide, each consisting of two footprints, one slightly ahead of the other.

Langkah-langkah **Pelaksanaan PP 23**



DAFTAR NPWP

(Jika belum terdaftar)

Wajib Pajak **ORANG PRIBADI**



PERSYARATAN



Fotokopi **KTP**



Surat pernyataan bermeterai
dari WP yang menyatakan
kegiatan dan lokasi/tempat
usaha





PERSYARATAN



Akte/dokumen pendirian

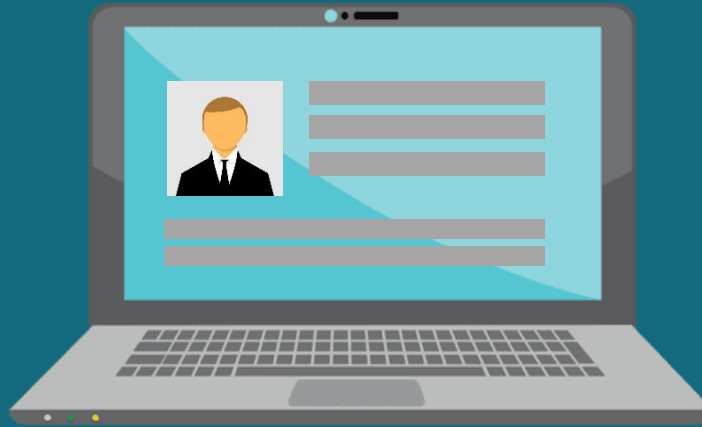


Fotokopi KTP & NPWP
salah satu pengurus



Surat pernyataan bermeterai
dari salah satu pengurus yang
menyatakan kegiatan dan
lokasi/tempat usaha





Jika dokumen persyaratan daftar NPWP OP/Badan **telah tersedia** dalam data elektronik pada Basis Data Elektronik DJP, maka fotokopi persyaratan tersebut tidak perlu dilampirkan.

LANGSUNG SAMPAIKAN KE KPP ATAU KP2KP



YANG WILAYAH KERJANYA MELIPUTI:

- 📍 TEMPAT TINGGAL (WP OP)
- 📍 TEMPAT KEDUDUKAN (WP BADAN)

JANGKA WAKTU HANYA
1 HARI KERJA





Wajib Pajak juga bisa mendaftar melalui E-Registration

<https://ereg.pajak.go.id/>



Login

 881720890655000





? PeVWaj

Login 

Lupa Password ?

Klik [lupa password](#) melihat password anda atau [reset](#) untuk mereset password Anda.

Belum punya Akun?

Klik [daftar](#) untuk wa baru yang belum



CARA **HITUNG**

Contoh 1

PAJAK
UMKM
0.5
%

Penentuan Peredaran Bruto

Peredaran Bruto Tuan A Tahun 2019



Pasar A: Rp 1 Miliar



Pasar B: Rp 2 Miliar

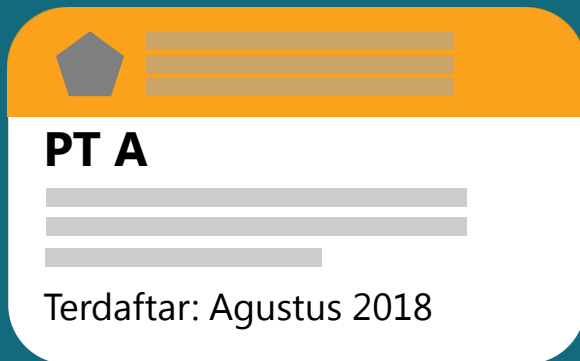


Pasar C: Rp 2 Miliar

Tuan A pada tahun 2020 tidak dapat dikenai Pajak Penghasilan Final,
karena peredaran bruto usaha Tuan A dari seluruh tempat usaha pada
tahun 2019 **melebihi Rp4.800.000.000,00**

Contoh 2

PAJAK
UMKM
0.5
%



PT A terdaftar pada Agustus 2018.
Bagaimana pengenaan PPh terhadap PT A?

Jika PT A memilih untuk dikenai PPhFinal 0,5%

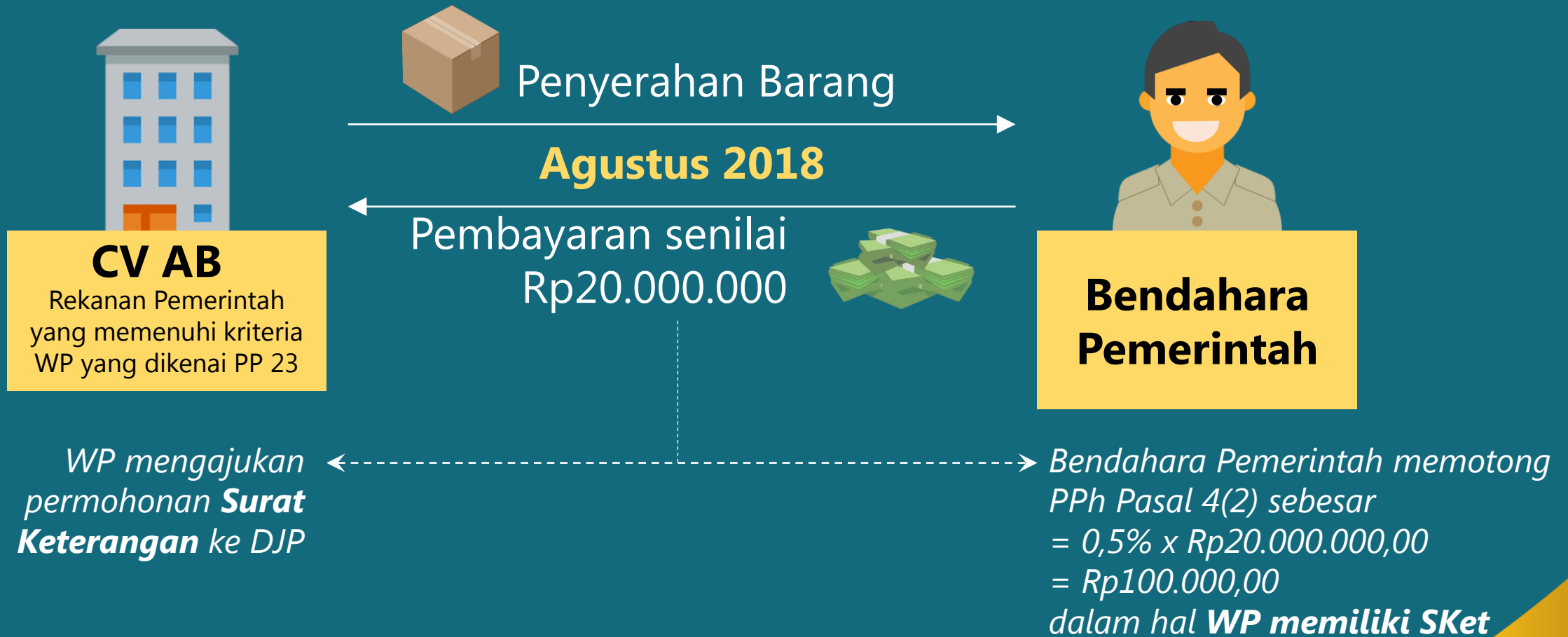
penghasilan bruto Agustus-Desember 2018 dikenai PPh final sebesar 0,5% dari peredaran bruto setiap bulan.

Jika PT A memilih untuk dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum

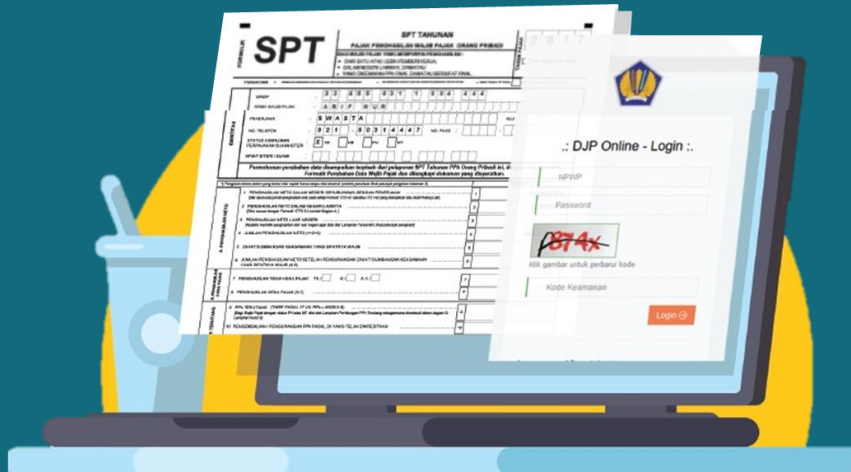
PT A wajib menyampaikan pemberitahuan ke DJP. Atas penghasilan tahun pajak 2018 dan seterusnya dikenai pajak sesuai ketentuan umum.

Contoh 3

Pemotongan/Pemungutan oleh Pihak Lain



Pemotong/Pemungut wajib memotong/memungut PPh sebesar 0,5% dari penjualan.



CARA LAPOR

Cara isi SPT 1770

PAJAK
UMKM
0.5
%

- Isi **baris 16**
- Kolom **DASAR PENGENAAN PAJAK/PENGHASILAN BRUTO** diisi **omzet**
- Kolom **PPh Terutang** diisi **PPh 0,5%**

FORMULIR 1770 - III LAMPIRAN - III
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

• PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
• PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
• PENGHASILAN ISTERIUSUAMI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH

PERMINTAAN : ☐ BERKASUS BERKASUS PETAJUAN PENGUSAHA ☐ BERKASUS HURUF CETAK: GEMUK DENGAN TITIK HURUF ☐ GEMUK TABEL "1" DALAM ☐ GEMUK PLANSI YANG BERSAMA

NPWP :

NAMA WAJIB PAJAK :

BAGIAN A : PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

NO	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK/PENGHASILAN BRUTO	PPh TERUTANG (Rp/ribu)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, DISKONTO SBL, SURAT BERHARGA NEGLIASI		
2.	BUNGA DISKONTO OBLIGASI		
3.	PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK		
4.	WADAH LUNAS		
5.	PELANGGAN, TUNJANGAN HARI TUA DAN TERUSAN PASISIR YANG DIKAYIRKAN BERKASUS		
6.	KONTRAKSIAN ATAS BEBAN APRI / APRI		
7.	PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN		
8.	BUNGKUS YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUNAN SIKAP BERSAMA		
9.	SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN		
10.	USAHAA JASA KONSTRUKSI		
11.	PENYALURAN/DALEPASAN PRODUK BSM		
12.	BUNGA SIPKUNYI YANG DIKAYIRKAN OLEH KOPERASI SIPKUNYI ANGGOTA KOPERASI		
13.	PENGHASILAN DARI TRANSKASI DERIVATIF		
14.	DIVIDEN		
15.	PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL		
16.	PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL		
17.	JUMLAH (1 s.d. 16)		

16.

PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO	SUMBER/USN PENGHASILAN	PENGHASILAN
(1)	(2)	(3)
1.	BANTUAN / SUMBANGAN / HIBAH	
2.	WARISAN	
3.	BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEKUTUAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI	
4.	KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, SEASISWA	
5.	SEASISWA	
6.	PENGHASILAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	
7.	JUMLAH BAGIAN B	

BAGIAN C : PENGHASILAN ISTERIUSUAMI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH

PENGHASILAN NETO ISTERIUSUAMI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH	
--	--

FORMULIR 1770 - IV LAMPIRAN - IV
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

• DARI PERUSAHAAN YANG BERSAMA
• KEMERIAHATAN PADA AKHIR TAHUN
• DAFTAR BUKTI/ANALISA KEMERIAHATAN

PERMINTAAN : ☐ BERKASUS BERKASUS PETAJUAN PENGUSAHA ☐ BERKASUS HURUF CETAK: GEMUK DENGAN TITIK HURUF ☐ GEMUK TABEL "1" DALAM ☐ GEMUK PLANSI YANG BERSAMA

NPWP :

NAMA WAJIB PAJAK :

BAGIAN A : HARTA PADA AKHIR TAHUN

NO	KODE HARTA	NAMA HARTA	TAKSI PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (Rp/ribu)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
34.					
35.					
36.					
37.					
38.					
39.					
40.					
41.					
42.					
43.					
44.					
45.					
46.					
47.					
48.					
49.					
50.					
51.					
52.					
53.					
54.					
55.					
56.					
57.					
58.					
59.					
60.					
61.					
62.					
63.					
64.					
65.					
66.					
67.					
68.					
69.					
70.					
71.					
72.					
73.					
74.					
75.					
76.					
77.					
78.					
79.					
80.					
81.					
82.					
83.					
84.					
85.					
86.					
87.					
88.					
89.					
90.					
91.					
92.					
93.					
94.					
95.					
96.					
97.					
98.					
99.					
100.					
101.					
102.					
103.					
104.					
105.					
106.					
107.					
108.					
109.					
110.					
111.					
112.					
113.					
114.					
115.					
116.					
117.					
118.					
119.					
120.					
121.					
122.					
123.					
124.					
125.					
126.					
127.					
128.					
129.					
130.					
131.					
132.					
133.					
134.					
135.					
136.					
137.					
138.					
139.					
140.					
141.					
142.					
143.					
144.					
145.					
146.					
147.					
148.					
149.					
150.					
151.					
152.					
153.					
154.					
155.					
156.					
157.					
158.					
159.					
160.					
161.					
162.					
163.					
164.					
165.					
166.					
167.					
168.					
169.					
170.					
171.					
172.					
173.					
174.					
175.					
176.					
177.					
178.					
179.					
180.					
181.					
182.					
183.					
184.					
185.					
186.					
187.					
188.					
189.					
190.					
191.					
192.					
193.					
194.					
195.					
196.					
197.					
198.					
199.					
200.					
201.					
202.					
203.					
204.					
205.					
206.					
207.					
208.					
209.					
210.					
211.					
212.					
213.					
214.					
215.					
216.					
217.					
218.					
219.					
220.					
221.					
222.					
223.					
224.					
225.					
226.					
227.					
228.					
229.					
230.					
231.					
232.					
233.					
234.					
235.					
236.					
237.					
238.					
239.					
240.					
241.					
242.					
243.					
244.					
245.					
246.					
247.					
248.					
249.					
250.					
251.					
252.					
253.					
254.					
255.					
256.					
257.					
258.					
259.					
260.					
261.					
262.					
263.					
264.					
265.					
266.					
267.					
268.					
269.					
270.					
271.					
272.					
273.					
274.					
275.					
276.					
277.					
278.					
279.					
280.					
281.					
282.					
283.					
284.					
285.					
286.					
287.					
288.					
289.					
290.					
291.					
292.					
293.					
294.					
295.					
296.					
297.					
298.					
299.					
300.					
301.					
302.					
303.					
304.					
305.					
306.					
307.					
308.					
309.					
310.					
311.					
312.					
313.					
314.					
315.					
316.					
317.					



CARA BAYAR



Kode Pembayaran



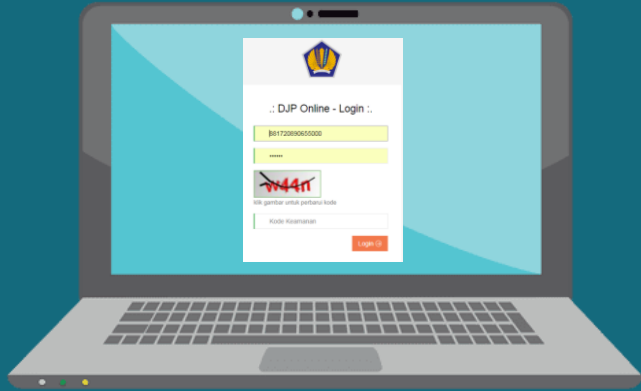
Kode **Akun Pajak**

411128

Kode **jenis setoran (KJS)**

420

1 **Buat** Kode Billing



- DJP Online (SSE1, SSE2, atau SSE3)
- Layanan billing-djp/ di KPP/KP2KP
- Kring Pajak 1500200
- Petugas Teller/CS Bank & Kantor Pos
- Internet Banking
- ASP
- SMS ID Billing *141*500#
- ATM

2 **Bayar** Pajaknya



- Petugas Teller Bank & Kantor Pos
- Mini ATM
- Internet Banking & Mobile Banking
- ATM

Cara Mudah Sekali Langkah

*Buat kode billing sekaligus bayar
PP 23/2018 dengan mesin ATM*



Bank Mandiri

1. Masukkan **PIN**
2. Pilih **Bayar/Beli**
3. Pilih **Lainnya**
4. Pilih **Penerimaan Negara**
5. Pilih **Buat ID Biling Pajak**, lalu **masukkan NPWP**
6. Pilih Jenis Pajak **PPH Final Bruto Tertentu**
7. Masukkan **Masa dan Tahun Pajak** (MMYYYY)
8. Masukkan **Jumlah Pajak yang dibayar**
9. Konfirmasi **Pembayaran** (Ya/Tidak)
10. Simpan **struk ATM** sebagai Bukti Penerimaan Negara (BPN)



Bank **BNI**

1. Masukkan **PIN**
2. Pilih **Menu Lain**
3. Pilih **Pembayaran**
4. Pilih **Pajak/Penerimaan Negara**
5. Pilih **Pajak Masa Tertentu**
6. Masukkan **15 digit NPWP**, pilih **Benar**
7. Pilih **PPh Final Bruto Tertentu**, pilih **Ya**
8. Masukkan **Masa dan Tahun Pajak** (MMYYYY)
9. Pilih benar, masukkan **Nominal Pajak**
10. Pastikan ulang, jika yakin pilih **Benar**
11. Simpan **struk ATM** sebagai Bukti Penerimaan Negara (BPN)

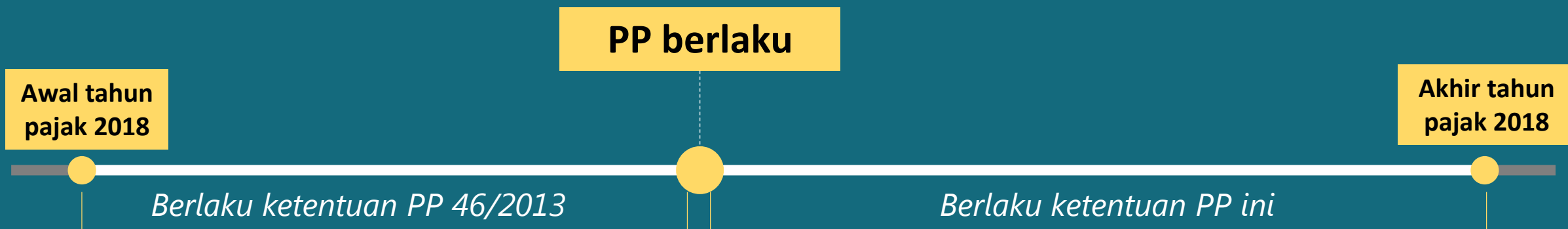


Bank **BCA**

1. Masukkan **PIN**
2. Pilih **Transaksi Lain**
3. Pilih **Pembayaran**
4. Pilih **MPN**
5. Pilih **Pajak Final Bruto Tertentu**
6. Masukkan **15 digit NPWP**, diikuti 2 digit bulan dan 2 digit tahun (NPWPMMYY)
Contoh untuk Masa Agustus 2018: 881720890655000**0818**
7. Pilih **Benar**
8. Pilih benar, masukkan **Nominal Pembayaran**
9. Pastikan ulang, jika yakin pilih **Benar**
10. Simpan **struk ATM** sebagai Bukti Penerimaan Negara (BPN)



KETENTUAN PERALIHAN



Dalam hal WP yang sebelumnya dikenai PP 46/2013 **tidak lagi memenuhi ketentuan WP berdasarkan PP ini**, maka:

- WP menggunakan tarif 0,5% dari PP ini sampai akhir tahun pajak 2018
- WP dikenai Pasal 17 UU PPh mulai tahun pajak 2019



Bagaimana cara melakukan **pencatatan dengan mudah?**

Bagaimana jika **sudah tidak bisa** menggunakan PPh Final 0,5%?

Bagaimana cara **membuat Pembukuan?**

Gunakan Aplikasi Android **AKUNTANSI UKM**

- ✓ Mempermudah pembuatan **pencatatan untuk PPh Final UMKM**
- ✓ Tersedia fitur **membuat SPT Tahunan PPh untuk PPh Final UMKM**
- ✓ Dapat digunakan sebagai media **belajar membuat pembukuan**
- ✓ Tersedia **petunjuk** dan **ilmu akuntansi dasar** tersegmentasi dalam bentuk **e-book**



Manfaatkan KESEMPATAN BAIK INI!



Untuk **turut membangun** negeri

Untuk **turut mengajak** UMKM lain
membangun negeri bersama-sama

karena...

PAJAK KITA UNTUK KITA

DJP

PAJAK
UMKM
0.5
%



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

#pajakkitauntukkita

TERIMA KASIH

Setengah persen, sepenuh hati...



www.pajak.go.id



1 500 200



@DitjenPajakRI

PP 46/2013 VS PP23/2018



	PP 46/2013	PP23/2018
Subjek Pajak	<ul style="list-style-type: none"> - WP Orang Pribadi - WP Badan tidak termasuk BUT 	<ul style="list-style-type: none"> - Wajib Pajak Orang Pribadi - WP Badan tertentu <ul style="list-style-type: none"> • PT • CV dan Firma • Koperasi
Pengecualian Subjek Pajak	<p>Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya menggunakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan <p>Wajib Pajak badan yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> belum beroperasi secara komersial; atau dalam jangka waktu 1 tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4,8M 	<ol style="list-style-type: none"> Wajib Pajak yang memilih untuk dikenai PPh berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E UU PPh persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas WP Badan yang memperoleh fasilitas Psl 31A UU PPh dan PP 94 Bentuk Usaha Tetap

PP 46/2013 VS PP23/2018



	PP 46/2013	PP23/2018
Batasan Omzet	Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8M dalam 1 Tahun Pajak	
Pengecualian Objek Pajak	a. penghasilan yang diterima atau diperoleh dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas; b. penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri; c. usaha yang atas penghasilannya telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan d. penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.	
Tarif	1 %	0,5%
Batasan Waktu	Tidak ada	1. WP OP : 7 tahun 2. CV/Firma/Koperasi : 4 tahun 3. PT : 3 tahun Dihitung sejak: WP lama : Tahun Pajak PP Berlaku WP Baru : Tahun Pajak terdaftar

PP 46/2013 VS PP23/2018



	PP 46/2013	PP23/2018
DPP	jumlah peredaran bruto setiap bulan	
Penyetoran	<ul style="list-style-type: none">a. Setor Sendirib. Dibebaskan dari pemotongan/pemungutan pihak lain dalam hal dapat menunjukkan SKB ke KPP	<ul style="list-style-type: none">a. Setor Sendiri; ataub. Dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak, dengan mengajukan Surat Keterangan ke KPP
Penentuan Pengenaan Pajak	Didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan.	Tetap. Penegasan untuk WP OP yang status Pisah harta dan Memilih Terpisah (2 NPWP) harus berdasarkan penggabungan sesuai prinsip keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis